



Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia

Fredick Broven Ekayanta*

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Fenomena politik yang kerap muncul menjelang pemilihan umum di Indonesia adalah tingginya intensitas pertemuan antarelite partai politik untuk membicarakan potensi koalisi. Fenomena ini merupakan implikasi dari regulasi pemilihan presiden yang memiliki ambang batas yang cukup besar, sementara tidak ada partai politik yang mendapatkan suara mayoritas. Fenomena ini terjadi sejak Maret 2022 hingga setidaknya Oktober 2022 dalam mempersiapkan pilpres tahun 2024. Dengan menggunakan paradigma kritik sosial yang secara sederhana memiliki asumsi bahwa setiap manusia itu bebas dan otonom tetapi ada struktur yang menghambat kebebasan dan otonomi itu sehingga struktur tersebut harus dikritik, tulisan ini berargumen bahwa fenomena tersebut menunjukkan dominasi dari oligarki dalam arena politik formal di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan gerakan sosial dari akar rumput yang memiliki agenda seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi. Hal ini menggambarkan semakin terkonsolidasinya kepentingan elite dalam mengendalikan politik Indonesia, sehingga memerlukan strategi gerakan sosial yang baru untuk memperjuangkan agenda-agenda reformisnya. Tulisan ini berargumen bahwa kondisi ini akan terus berlangsung selama gerakan sosial yang ada tidak mampu mengambil alih kontrol dan kendali atas arena politik formal.

Kata Kunci: reforma agraria, kedaulatan pangan, redistribusi, politik formal, pemilihan presiden

Abstract

The political phenomenon that often appears before the general election in Indonesia is a meeting between elite political parties to discuss potential coalitions. This phenomenon is based on the presidential election regulation which has a large barrier, while there is no political party that gains the majority vote. This phenomenon occurred from March 2022 until at least October 2022 in preparation for the presidential election in 2024. By using the paradigm of social criticism which assumes that every human being is free and autonomous but there is a structure that hinders that freedom and autonomy so that the structure must be criticized, this paper argues that this phenomenon shows the dominance of the oligarchy in the formal political arena in Indonesia, and at the same time getting rid of social movements from the grassroots that have an agenda such as agrarian reform, food security, and redistribution. This reflects the consolidation of elite interests in controlling Indonesian politics, thus requiring a new social movement strategy to fight for its reformist agenda. This paper argues that this condition will continue if the existing social movements are not able to take over control and control the formal political arena.

Keywords: agrarian reform, food security, redistribution, formal politics, presidential election

How to Cite: Ekayanta, Fredick Broven. (2022). Absennya Agenda Reforma Agraria, Kedaulatan Pangan, dan Redistribusi dalam Arena Politik Formal Indonesia, Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan, Vol 1 (No 2): 30-36

*Corresponding author: Fredick Broven Ekayanta

E-mail: frbrov@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Fenomena politik yang muncul beberapa bulan terakhir adalah pertemuan antara dua atau beberapa elite partai politik dalam membahas pembentukan koalisi pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024 (lihat Tabel 1). Fenomena ini merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia menjelang tahun pemilihan umum (pemilu). Fenomena

ini merupakan implikasi dari regulasi di Indonesia yang memberikan kewenangan bagi partai politik sebagai satu-satunya jalur yang bisa mengajukan calon presiden.

Tabel 1. Pertemuan Elite Partai Politik pada Maret-Oktober 2022

No	Tanggal	Pertemuan Elite Partai	Keterangan
1	29 Maret 2022	Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) berkunjung ke Partai Nasional Demokrat	-
2	12 Mei 2022	Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum Partai Amanat Nasional), dan Suharso Monoarfa (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan)	Membentuk Koalisi Indonesia Bersatu
3	1 Juni 2022	Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasional Demokrat) dan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra)	-
4	5 Juni 2022	Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat) dan Surya Paloh	-
5	18 Juni 2022	Muhaimin Iskandar (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) dan Prabowo Subianto	Mendeklarasikan koalisi untuk Pemilu 2024 pada tanggal 13 Agustus 2022
6	22 Juni 2022	Surya Paloh dan Ahmad Syaikhu (Presiden Partai Keadilan Sejahtera)	-
7	23 Juni 2022	Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Partai Nasional Demokrat lagi	-
8	22 Agustus 2022	Puan Maharani (Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Surya Paloh	-
9	4 September 2022	Prabowo Subianto dan Puan Maharani	-
10	26 September 2022	Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar	-

Sumber: Riset Kepastian Koalisi Parpol Dibutuhkan Pemilih (Wahyu, 2022)

Selain itu tingginya intensitas pertemuan elite-elite partai menjelang pemilu juga merupakan implikasi dari regulasi yang mengatur bahwa calon presiden dapat diusung jika partai politik atau gabungan partai politik mendapatkan minimal 20% dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% dari jumlah suara yang didapatkan pada pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019 maka tidak ada satupun partai yang mendapatkan suara mayoritas (lihat Tabel 2) sehingga membuat partai-partai membutuhkan koalisi untuk dapat mengusung calon presiden pada pemilu tahun 2024. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusung calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena memiliki 128 kursi di DPR, melebihi syarat 115 kursi atau 20% dari 575 kursi di DPR. Dengan tidak adanya pemilik kursi atau suara mayoritas, maka pembentukan koalisi oleh PDIP, dan terlebih apalagi oleh partai-partai lain, dalam pilpres dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam memenangkan kontestasi.

Tabel 2. Hasil Perolehan Suara, Presentasi Suara, dan Kursi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

No	Partai Politik	Suara		Kursi di DPR	
		Jumlah	Presentase (%)	Jumlah	Presentase (%)
1	PDIP	27.053.961	19,33	128	22,26

2	Gerindra	17.594.839	12,57	78	13,56
3	Golkar	17.229.789	12,31	85	14,78
4	PKB	13.570.097	9,69	58	10,08
5	Nasdem	12.661.792	9,05	59	10,26
6	PKS	11.493.663	8,21	50	8,69
7	Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,39
8	PAN	9.572.623	6,84	44	7,65
9	PPP	6.323.147	4,52	19	3,30
10	Perindo	3.738.320	2,67		
11	Berkarya	2.929.495	2,09		
12	PSI	2.650.361	1,89		
13	Hanura	2.161.361	1,54		
14	PBB	1.099.848	0,79		
15	Garuda	702.536	0,50%		
16	PKPI	312.765	0,22%		

Tidak memenuhi ambang batas parlemen (4%) sehingga tidak mendapatkan kursi

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Pilpres adalah arena politik formal baru sebagai hasil dari amendemen Undang Undang Dasar 1945.¹ Pilpres memungkinkan rakyat untuk menentukan sendiri presiden yang merupakan penguasa politik tertinggi dan berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ini berbeda dengan era Orde Baru saat presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebagai arena politik formal yang baru, pilpres dibayangkan bukan lagi didominasi oleh segelintir elite, tapi juga dapat dipengaruhi oleh massa. Keterpilihan Joko Widodo sebagai presiden pada pilpres 2014 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia punya kesempatan memiliki presiden yang bukan berasal dari elite lama seperti mantan militer, birokrat, ataupun petinggi partai. Dalam sebuah tulisan di Majalah Tempo disebutkan bahwa: “Joko Widodo bukan orator hebat. Ia berasal dari keluarga kebanyakan, dan selalu tampil sebagai orang biasa seperti kita...Jokowi juga besar dari lingkungan masyarakat kebanyakan...Kekuatan Jokowi itu disokong terutama oleh kerumunan relawan” (Tempo, 2014).

Akan tetapi peluang institusional yang menjadi lebih terbuka tersebut tidak serta merta menguntungkan rakyat. Faktanya, setelah empat kali pilpres (2004, 2009, 2014, 2019), Indonesia justru memasuki era memburuknya demokrasi, yang oleh berbagai ilmuwan sosial maupun politik digambarkan lewat berbagai macam istilah, mulai dari *democratic setbacks* (Hadiz, Indonesia's year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism?, 2017), *democratic decline* (Power, 2018), *democratic backsliding* (Aspinall & Mietzner, 2019), hingga *democratic deconsolidation* (Mietzner, 2016). Menurut ilmuwan politik Olle Törnquist, pemerintah Indonesia membangun kekuatan politik yang besar dalam aliansi elite partai, militer, kelompok bisnis, dan di sisi lain memecah belah kelompok sosial yang ada di tengah masyarakat (Hamdi, 2022).

Dalam konteks seperti itu menjadi menarik untuk mengkaji lebih jauh apa makna fenomena meningkatnya intensitas pertemuan elite partai menjelang pemilu 2024, serta bagaimana peluang gerakan sosial dari rakyat dalam memengaruhi kontestasi pilpres 2024 ini. Pertanyaan lanjutan yang bisa dielaborasi adalah mengapa pada tahap awal pilpres ini, minim sekali keterlibatan rakyat sehingga meminggirkan agenda-agenda gerakan sosial seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi.

¹ Pasal 6A UUD 1945 hasil amendemen berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat”. Amendemen UUD 1945 adalah salah satu dari enam agenda reformasi pada 1998. Lima agenda lain adalah: mengadili Soeharto dan kroninya, menghapuskan dwifungsi ABRI, berantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), otonomi daerah seluas-luasnya, dan menegakkan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan paradigma kritis untuk menjelaskan fenomena pertemuan elite partai dan peluang gerakan sosial menjelang pemilu 2024. Paradigma kritis merupakan proses yang berusaha mengungkap struktur di balik ilusi yang ditampilkan dunia materi, dengan tujuan membentuk kesadaran sosial agar memperbaiki dan mengubah kehidupan manusia (Raffiudin (ed), 2014). Alasan pemilihan paradigma ini adalah adanya keterbatasan dari paradigma positivisme dan interpretatif untuk membongkar makna sesungguhnya di balik pertemuan elite partai menjelang pemilu ini. Dalam paradigma kritis, realitas yang diamati merupakan realitas semu yang telah terkonstruksi melalui proses sejarah dari kekuatan sosial, budaya dan ekonomi politik (Guba, 1990). Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melakukan kritik sosial terhadap fenomena politik kontemporer di Indonesia saat ini yang sangat elitis, sekaligus memberikan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengefektifkan pencapaian agenda-agenda gerakan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Surya Paloh tanggal 29 Maret 2022 menyepakati bahwa Partai Demokrat dan Partai Nasional Demokrat penundaan pemilu mengkhianati amanat reformasi dan demokrasi Indonesia. Selain itu pertemuan itu membahas harga bahan-bahan pokok yang naik dan peluang koalisi pada pemilu 2024 (Mantalean, 2022). Sementara pertemuan antara Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 4 Juni 2022 menyepakati pembentukan koalisi secara tertulis, dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu, setelah sebelumnya bertemu pada tanggal 12 Mei 2022. Selain itu pertemuan tiga partai juga menyepakati bahwa ketiganya ingin mengakhiri politik identitas dan masih terbuka akan bergabungnya partai lain (Zaki, 2022). Pertemuan antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto tanggal 1 Juni 2022 disebut membicarakan hal-hal romantisme dan semangat persahabatan antara Nasdem dan Gerindra. Keduanya juga disebut memiliki hubungan batin dan kesamaan visi kebangsaan, meskipun kadang-kadang memilih jalan yang berbeda dan pernah bersaing (Chaterine, 2022).

Pertemuan antara Muhaimin Iskandar dan elite-elite PKB bersama Prabowo Subianto dan elite-elite Partai Gerindra pada tanggal 18 Juni 2022 disebutkan telah memiliki kesepakatan untuk kerja sama menghadapi tanggung jawab tiga jenis pemilu pada tahun 2024, yaitu pemilu legislatif, pilpres, dan pemilihan kepala daerah (Sulistyo, 2022). Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan deklarasi koalisi PKB- Gerindra yang dinamai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pada tanggal 13 Agustus 2022 pada momen rapat pimpinan nasional Gerindra. Bentuk koalisi tersebut disepakati dalam bentuk piagam koalisi yang berisi lima poin diantaranya Gerindra dan PKB bekerja sama dalam pemilu serentak tahun 2024, visi bersama percepatan pembangunan untuk Indonesia, menyatukan dua kekuatan besar di Indonesia yaitu nasionalis dan religius untuk menghindari polarisasi masyarakat, serta calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Saputra, 2022).

Pertemuan antara Surya Paloh dan Ahmad Syaikhul beserta elite-elite PKS dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 dan disebut menghasilkan tiga titik temu antara kedua partai, yaitu membangun kesadaran masyarakat sebagai warga negara, menjadikan pemilu 2024 sebagai instrumen demokrasi dengan semangat toleransi dan persatuan bangsa, serta menyepakati persiapan kerja sama pilpres 2024 (Virgiawan, 2022). Pada tanggal 22 Agustus 2022 giliran Puan Maharani dan beberapa elite PDIP yang bertemu dengan Surya Paloh dan elite-elite Partai Nasdem. Puan menyebut pertemuan itu sebagai safari ke partai-partai politik dalam rangka menyongsong pemilu 2024 (Nelfira, 2022). Dalam safari politik selanjutnya, Puan dan elite-elite PDIP bertemu Prabowo Subianto,

dan menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu komitmen bersama untuk membangun bangsa, membangun politik yang santun dan bersuka ria tanpa bermusuhan, serta komitmen mengemban kepercayaan masyarakat dalam menjalankan pesta demokrasi untuk kemajuan bangsa dan negara (Yahya, 2022). Berikutnya, Puan Maharani bertemu dengan Muhaimin Iskandar pada tanggal 25 September 2022, yang lagi-lagi menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan momentum membangun kerja sama untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama (Prastiwi, 2022).

Pertemuan demi pertemuan yang diselenggarakan oleh elite-elite partai politik di atas dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun koalisi pilpres, meskipun koalisi tersebut dibangun di atas perbedaan ideologi ataupun pengalaman koalisi sebelumnya. Koalisi dalam politik Indonesia seperti ini dapat dipahami sebagai tujuan, bukan instrumen, yaitu tujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil. Logika koalisi ini mengupayakan pembentukan kekuatan yang tersebar menjadi kesatuan yang lebih besar dan berdaya untuk merebut kekuasaan pemerintahan. Atau dalam kata lain, koalisi ditujukan sebagai mesin politik pendulang suara pada pemilu (Fatah, 2004). Fenomena pembentukan koalisi yang cenderung membangun kekuatan politik yang besar ini kemudian menghambat munculnya oposisi, sehingga Slater menyebut fenomena ini sebagai kartelisasi partai (Slater, 2018).

Gerakan sosial yang membawa agenda-agenda yang dekat dengan kebutuhan masyarakat seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi kemudian menjadi terpinggirkan. Kondisi ini kemudian disimpulkan oleh Anugrah sebagai pertanda adanya kemunduran demokrasi di Indonesia secara perlahan dan meningkatnya kecenderungan iliberal (Anugrah, *The Illiberal Turn in Indonesian Democracy*, 2020) (Anugrah, *Persoalan Agraria dan Demokrasi di Indonesia*, 2019). Diskusi yang sangat elitis dalam pertemuan-pertemuan antarelite tersebut juga mencerminkan tidak dilibatkannya masyarakat luas dalam proses penentuan calon presiden. Ini akan menyulitkan munculnya calon-calon presiden alternatif yang muncul dari gerakan sosial dan berasal dari akar rumput. Sebagai konsekuensinya, agenda-agenda politik yang muncul ke permukaan pun didominasi oleh elite-elite partai.

Dalam kajian politik Indonesia pasca reformasi, pendekatan struktural-elitis memberikan gambaran mengenai konteks struktural politik Indonesia bekerja. Pendekatan ini mengkritik pendekatan liberal-pluralis yang terlalu memusatkan perhatian pada peran agensi. Contoh kajian yang menggunakan pendekatan struktural-elitis ini misalnya tulisan Hadiz dan Robison yang berargumen bahwa perubahan politik Indonesia pasca transisi tidak serta merta menjamin perubahan, tetapi justru dibajak oleh elite-elite dominan lama (Hadiz & Robison, *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*, 2013). Sementara dalam kajian yang lain, Winters berkesimpulan bahwa politik Indonesia pasca reformasi tetap ditandai dengan keberadaan segelintir orang yang sangat kaya (baca: oligarki) yang mempengaruhi bahkan mendominasi politik untuk mempertahankan kekayaannya (*politics of wealth defense*) (Winters, 2013). Menurut Wijaya, agenda oligarki untuk menguasai arena politik formal dimungkinkan akibat sistem kompetisi politik di Indonesia berlangsung tanpa sistem hukum yang kuat, dan berkarakteristik mahal, teritorial, feodal, dan primordial (Wijaya, 2021). Oleh karena itu siapapun calon presiden yang muncul akan sangat ditentukan oleh relasi oligarki (Rainditya, 2022). Dapat disimpulkan bahwa institusi pilpres hingga saat ini belum berhasil memperluas dan memperkuat partisipasi politik.

Oligarki yang mendominasi politik Indonesia ini mengusung agenda dan kepentingan yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan agenda dan kepentingan masyarakat di akar rumput. Bagi kelompok oligarki, segala macam bentuk kebijakan ataupun kegiatan yang menghalangi proses akumulasi kekayaan adalah ancaman. Agenda-agenda seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi ini adalah

beberapa ancaman tersebut. Pada akhirnya, dapat juga dimaknai bahwa pertemuan-pertemuan elite partai sejatinya adalah negosiasi kepentingan-kepentingan oligarki yang akan bersaing lagi untuk memperebutkan kekuasaan pada pilpres tahun 2024.

KESIMPULAN

Fenomena pertemuan-pertemuan elite partai politik menjelang pemilu di Indonesia adalah pertanda dominasi oligarki yang terus berlanjut dalam arena politik formal di Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan gerakan sosial dari akar rumput yang memiliki agenda seperti reforma agraria, kedaulatan pangan, dan redistribusi. Fenomena ini dimungkinkan karena regulasi mengatur bahwa partai politik adalah pemain utama dalam arena politik formal, dan ada hambatan dalam bentuk ambang batas pencalonan yang membatasi partai-partai untuk mengusung calonnya. Situasi ini mencerminkan semakin terkonsolidasinya kepentingan elite dalam mengendalikan politik Indonesia dan kondisi ini akan terus berlangsung selama gerakan sosial yang ada tidak mampu mengambil alih kontrol dan kendali atas arena politik formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, I. (2019). Persoalan Agraria dan Demokrasi di Indonesia. *Prisma*, Vol 38 No 3, 3-16.
- Anugrah, I. (2020). The Illiberal Turn in Indonesian Democracy. *The Asia-Pacific Journal*, Vol 18 No 1, 1-17.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 55 No 3, 295-317.
- Chatherine, R. N. (2022, Juni 2). *Pertemuan Empat Setengah Jam Prabowo dan Surya Paloh*. Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/07480291/pertemuan-empat-setengah-jam-prabowo-dan-surya-paloh](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/07480291/pertemuan-empat-setengah-jam-prabowo-dan-surya-paloh)
- Fatah, E. S. (2004, April 19). *Koalisi*. Retrieved from [tempo.co: koran.tempo.co](http://koran.tempo.co)
- Guba, E. (1990). *The Paradigm Dialog*. Newbury Park: Sage.
- Hadiz, V. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 53 No 3, 261-278.
- Hadiz, V., & Robison, R. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, Vol 96, 35-57.
- Hamdi, I. (2022, April 12). *Bertumpu pada Gerakan Mahasiswa*. Retrieved from [tempo.co: https://koran.tempo.co/read/nasional/473097/gerakan-sosial-dan-demokrasi-di-indonesia-saat-ini-bergeser-dari-agenda-reformasi](https://koran.tempo.co/read/nasional/473097/gerakan-sosial-dan-demokrasi-di-indonesia-saat-ini-bergeser-dari-agenda-reformasi)
- Mantalean, V. (2022, Maret 29). *AHY-Surya Paloh Bertemu, Demokrat dan Nasdem Sepakat Tolak Penundaan Pemilu*. Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/13023941/ahy-surya-paloh-bertemu-demokrat-dan-nasdem-sepakat-tolak-penundaan-pemilu](https://nasional.kompas.com/read/2022/03/29/13023941/ahy-surya-paloh-bertemu-demokrat-dan-nasdem-sepakat-tolak-penundaan-pemilu)
- Mietzner, M. (2016). Coercing loyalty: coalitional presidentialism and party politics in Jokowi's Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, Vol 38 No 2, 209-232.
- Nelfira, W. (2022, Agustus 22). *Temui Surya Paloh, Puan Maharani: Ditugaskan Ibu Ketua Umum*. Retrieved from [liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/5048646/temui-surya-paloh-puan-maharani-ditugaskan-ibu-ketua-umum](https://www.liputan6.com/news/read/5048646/temui-surya-paloh-puan-maharani-ditugaskan-ibu-ketua-umum)
- Prastiwi, D. (2022, September 25). *liputan6.com*. Retrieved from 6 Hal Terkait Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin di TMP Kalibata:

- <https://www.liputan6.com/news/read/5079509/6-hal-terkait-pertemuan-puan-maharani-dan-cak-imin-di-tmp-kalibata>
- Power, T. (2018). Jokowi's authoritarian turn and Indonesia's democratic decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 54 No 3, 307-338.
- Raffiudin (ed), R. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Depok: Puskapol.
- Rainditya, D. R. (2022, September 16). *Partai Politik dan Harapan Kosong Pemilu 2024*. Retrieved from IndoProgress: <https://indoprogress.com/2022/09/partai-politik-dan-harapan-kosong-pemilu-2024/>
- Saputra, M. G. (2022, Agustus 13). *Ini 5 Poin Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/politik/ini-5-poin-deklarasi-koalisi-gerindra-pkb.html>
- Slater, D. (2018). Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition. *Journal of East Asian Studies*, Vol 18, 23-46.
- Sulistyo, P. D. (2022, Juni 18). *Bertemu 2 Jam dengan Muhaimin, Prabowo: Sudah Ada Titik Kesepakatan*. Retrieved from kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/18/bertemu-dua-jam-dengan-muhaimin-prabowo-sudah-ada-titik-kesepakatan>
- Tempo, M. (2014). *"Sejarah Baru Sedang Kita Buat"*. Jakarta : Majalah Tempo.
- Virgiawan, R. (2022, Juni 23). *Surya Paloh-Ahmad Syaikhu Bertemu, NasDem dan PKS Hasilkan 3 Titik Temu*. Retrieved from cakra.news: <https://cakra.news/surya-paloh-ahmad-syaikhu-bertemu-nasdem-dan-pks-hasilkan-3-titik-temu/>
- Wahyu, Y. (2022, September 29). Riset: Kepastian Koalisi Parpol Dibutuhkan Pemilih. *Harian Kompas*.
- Wijaya, H. (2021). Evolusi Oligarki di Indonesia. In Wijayanto, A. P. Budiatri, & H. P. Wiratraman, *Demokrasi tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (pp. 822-830). Depok: LP3ES dan Universitas Diponegoro.
- Winters, J. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. *Indonesia*, Vol 96, 11-33.
- Yahya, A. N. (2022, September 4). *Tiga Poin Hasil Pertemuan Prabowo dan Puan di Hambalang*. Retrieved from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/04/21240981/tiga-poin-hasil-pertemuan-prabowo-dan-puan-di-hambalang>
- Zaki, M. F. (2022, Juni 5). *3 Poin yang Disepakati Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Bersatu*. Retrieved from tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1598497/3-poin-yang-disepakati-ketua-umum-parpol-koalisi-indonesia-bersatu>